

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Setelah lengsernya rezim yang dipimpin oleh Muammar Khadafi pada tahun 2011, Libya merupakan negara yang berkonflik. Karena konflik yang terus menerus melanda negara tersebut, terjadi ketidak stabilan politik serta isu kemanusiaan di Libya. Setidaknya pada bulan Februari 2011 telah tercatat sebanyak 300 orang tewas, maka PBB turun tangan untuk membentuk sidang terkait situasi tersebut. Pada 2014, Libya belum memiliki NAP untuk Resolusi 1325. Namun, Libya mulai menggunakan DK PBB 1325 ke NAP melalui adanya kerjasama Kementerian Urusna Perempuan di Libya dengan UN Women pada tahun 2021 dengan dukungan dari Finlandia serta Norwegia. Meskipun NAP di Libya baru disusun di tahun 2021, pada tahun 2016 organisasi internasional seperti UNSMIL dan UN Women telah menyelenggarakan pelatihan bagi perempuan yang ada di Libya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman atas WPS 1325 sebagai persiapan dari penyusunan NAP walaupun sampai saat ini Libya belum juga memiliki NAP secara resmi.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana *Women, Peace, and Security* 1325 diimplementasikan di Libya beserta para partner dalam kurun waktu 2011-2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah skripsi serta untuk mengetahui kebijakan apa yang dilakukan oleh Libya dalam pengimplementasian WPS 1325 di tengah konflik yang sedang terjadi di negaranya. Penelitian ini menggunakan kerangka *partnership* yang merupakan hubungan

dimana semua pihak terhubung dan saling menguntungkan serta terjalin dengan baik antara dua organisasi ataupun lebih guna dapat mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. *Partnership* ini mencakup adanya komitmen kepada hubungan, tujuan bersama, pembagian secara adil, serta struktur yang telah disepakati semua pihak.

Penelitian ini menggunakan *Women, Peace, and Security* (WPS) sebagai konsep penulisan. Konsep ini membahas mengenai dampak dari adanya konflik khusus terkait gender terhadap para perempuan di semua umur, serta perlindungan atas kekerasan seksual yang berbasis gender, mendorong adanya partisipasi perempuan dalam pembentukan perdamaian serta keamanan, mendukung adanya peran perempuan sebagai pembangun perdamaian dalam lingkup pencegahan konflik. konsep *Women, Peace, and Security* (WPS) yang dalam proses pengimplementasiannya berfokus pada 4 pilar utama yakni pilar partisipasi, pilar perlindungan, pilar pencegahan, dan yang terakhir ialah pilar bantuan dan pemulihan. Aktor yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pilar-pilar tersebut ialah pemerintah nasional, Organisasi Regional, Organisasi Internasional Non-Pemerintah (INGO) serta masyarakat sipil, komunitas lokal serta para perempuan yang berada di wilayah konflik.

Dalam pilar partisipasi, pemerintah Libya berusaha untuk meningkatkan keterlibatan perempuan melalui LPDF serta program *1325 Network*. Namun sayangnya Libya tidak dapat mencapai target angka keterlibatan perempuan menurut standar internasional sebesar 30%, Libya hanya dapat mencapai 16%. Hal tersebut dikarenakan adanya UU No.02 tahun 2021 yang menurunkan kuota

perempuan di politik. Pada pilar perlindungan, Libya berusaha melakukan pengimplementasian dengan cara pendirian *Safe Space*, distribusi *dignity kits*, dan RUU mengenai anti-kekerasan terhadap perempuan. Namun adanya keamanan yang rapuh di Libya, norma patriarki yang kuat, serta kerangka hukum yang lemah membuat efektivitas perlindungan perempuan di Libya menjadi terhambat.

Pada pilar pencegahan, pemerintah Libya bekerjasama dengan para mitra internasional untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas multi-sektor serta layanan darurat *Help Line 1417*. Hal tersebut dilakukan untuk merespons atas adanya kasus kekerasan berbasis gender di Libya, namun pemerintah Libya masih sangat bergantung kepada lembaga internasional karena belum adanya kebijakan nasional yang komprehensif seperti NAP. Pada pilar terakhir yakni pilar bantuan dan pemulihan, pemerintah Libya dan partner mendirikan pelayanan kesehatan mental serta dukungan psikososial (MHPSS), dan mendirikan program *Ra'idat* yang merupakan program untuk membantu proses pemulihan perempuan penyintas. Ketidak adanya NAP di pemerintahan Libya membuat upaya yang dilakukan menjadi belum maksimal dan belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan nasional yang jelas.

4.2 Saran

Penelitian ini memiliki hambatan dalam mengakses ketersediaan data primer yang bersumber secara langsung dari para aktor lokal di Libya serta minimkan literatur akademik yang mengangkat isu WPS 1325 di Libya. Oleh karenanya, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih jauh terkait

keterlibatan perempuan pada tingkat komunitas agar pengimplementasian Resolusi 1325 tidak hanya dianalisis dari sisi implementasi. Selain itu, penelitian berikutnya juga diperlukan untuk menelaah hubungan antara dinamika politik domestik yang ada di Libya dengan keberlanjutan program WPS, termasuk pada bagian sejauh apa sisi politik di Libya dapat berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan semua pilar.

Sementara itu saran bagi pemerintah Libya, sangat penting untuk segera merumuskan serta mengesahkan NAP secara resmi. Hal tersebut karena NAP nantinya akan menjadi dasar koordinasi antar-lembaga yang ada serta pemberi arah yang jelas dalam mengimplementasikan program-program WPS. Selain itu, pemerintah Libya juga perlu untuk meningkatkan sumber daya domestik agar tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan internasional. Bagi organisasi internasional yang membantu Libya, sebaiknya program-program yang dijalankan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi harus tetap diarahkan pada keberlanjutan program. Pendekatan jangka panjang akan membantu memastikan bahwa inisiatif dari semua pihak yang terlibat tetap berjalan dan tetap dapat diteruskan meskipun situasi politik di Libya masih mengalami beberapa kendala dalam konflik.

Bagi masyarakat sipil, diperlukan adanya penguatan advokasi melalui jaringan lain seperti *1325 Network* guna dapat mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap isu-isu yang tengah bergejolak di Libya. Hal ini karena peranan masyarakat sipil tak kalah penting dalam menjalankan pengimplementasian serta guna memberikan tekanan publik kepada pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan dan tengah dijalankan benar-benar diberikan kepada sasaran yang tepat yakni perempuan dan kelompok rentan.